

Laporan Penerapan Tata Kelola Usaha Yang Baik Tahun 2023



TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Disetujui dan Nomor Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Drajat Hendarsan	Komisaris Utama	15 Maret 2023 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-92/NB.02/2023	18 Mei 2022 dan masa Jabatan 3 tahun	WNI	Jakarta
2.	Supomo	Komisaris	5 Agustus 2019, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-434/NB.11/2019	18 Mei 2022 dan masa Jabatan 3 tahun	WNI .	Surabaya
3.	Tri Agus Darmawan	Direktur Utama	14 Agustus 2018, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-768/NB-11/2018	18 Mei 2022 dan masa jabatan 3 tahun	WNI	Sidoarjo
4.	Noor Alim Fardianto	Direktur	9 Mei 2019, Keputusan	18 Mei 2022 dan masa	WNI	Surabaya

			Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor:KEP-262/NB.11/2019	jabatan 3 Tahun		
--	--	--	--	-----------------	--	--

1. Profil Pengurus PT. Sarana Jatim Ventura

Profil Direksi PT. Sarana Jatim Ventura

DIREKTUR UTAMA



TRI AGUS DARMAWAN

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun. Berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Jember, 5 Agustus 1973. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1996. Pertama kali diangkat menjadi Direktur Investasi melalui RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2015. terakhir diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perusahaan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 18 Mei 2022

Pelatihan dan Sertifikasi yang dimiliki:

- 2015 : Manajemen Resiko I & II, PT. Bisnis Indonesia Gagasan kreaitama.
- 2014 : Pelatihan Mediasi dan Lulus Sertifikasi sebagai Mediator, Pusat Mediasi Nasional
- 2012 : Workshop Produk Investasi PMVD untuk Senior VCO, PT. Selaras Inti Prima Indonesia.
- 2009 : Training Investasi, Legal dan Appraisal Perusahaan Modal Ventura Daerah, PT. Bahana Artha Ventura.
- 2008 : Program Pengembangan Eksekutif Problem Solving and decision Making, Lembaga Manajemen PPM.
- 2007 : Kursus Konsultan Pajak Brevet A & B, Politeknik UBAYA dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
- 2005 : ESQ Leadership Training , ESQ Leadership Center.
- 2004 : Project Remedial Program, PT. Bahana Artha Ventura.

Riwayat Kerja :

- 1997-2011 : VCO Investasi, Monitoring dan Remedial PT. Sarana Jatim Ventura
- 2011-2012 : Kepala Bagian Investasi PT. Sarana Jatim Ventura.
- 2012-2015 : Kepala Divisi Investasi PT. Sarana Jatim Ventura.
- 2015 -2017 : Direktur Investasi PT. Sarana Jatim Ventura.
- 2017- saat ini : Direktur Utama PT. Sarana Jatim Ventura.

DIREKTUR**Noor Alim Fardianto, S.E., M.Ak., M.SEI., Ak., CA., CERA., ACPA., Asean CPA**

Warga Negara Indonesia, 47 Tahun. Berdomisili di Surabaya. Lahir di Ponorogo, 12 Nopember 1976. Memperoleh Gelar Magister Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim pada tahun 2016, Magister Sains Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2022 dan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000.

Pertama kali diangkat menjadi Direktur Operasional melalui RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2015 dan terakhir diangkat kembali menjadi Direktur dalam RUPS Luar Biasa tanggal 18 Mei 2022

Pelatihan dan Sertifikasi yang dimiliki :

- 2007 : Brevet Pajak A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia No. 0268/IAI-JTM/PAJAK 2007
- 2014 : Chartered Accountant (CA Indonesia) No. 11.D35301 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Anggota Utama IAI. Sert.CA – 0000004875
- 2015 : Register Negara Akuntan No.RNA.9475 dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. Sertifikat 0009163
- 2017 : Certified Enterprise Risk Analyst (CERA) dari Academy of Finance and Management Australia. No. AFMA – 20171243071-05
- 2018 : Kandidat Certified Public Accountant (Kandidat- CPA) Surat IAPI No. 1504/XI/IAPI/2018
- 2019 : Associate Certified Public Accountant (ACPAdari Institut Akuntan Publik Indonesia) No. CA.000932
 - : Penilaian Kemampuann dan Kepatutan (Fit & Proper Test) selalu Direktur PT Sarana Jatim Ventura Nomor Kep-262/NB.11.2019
 - : Izin Akuntan Berpraktik (AB) Nomor 260/KM.1PPPK/2019 dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 2022 : Asean Chartered Professional Accountants (Asean CPA dari ACPACC) Reg.No. 6009 / ID 0006009 tanggal 31 Mei 2022

Riwayat Kerja:

- 2000-2004 : Supervisor KAP Haryono, Adi dan Agus Surabaya
- 2004-2005 : Chief Accounting PT. STAR (Ria Group Indonesia)
- 2005-2008 : Internal Auditor PT. Sarana Jatim Ventura
- 2012-2015 : Kepala Divisi Operasional PT. Sarana Jatim Ventura
- 2015-saat ini : Direktur PT Sarana Jatim Ventura
- 2016- saat ini: Komisaris PT Karya Usaha Andalan Mandiri

PROFIL DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA

Drajat Hendarsan, S.E.Ak



Warga Negara Indonesia, 50 Tahun. Berdomisili di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta, 22 Oktober 1973. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 1998.

Beliau diangkat pertama kali menjadi Komisaris Utama di PT. Sarana Jatim Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Mei 2022.

Pelatihan dan Sertifikasi yang dimiliki:

- 2003 : Pelatihan Remedial, PT. BAV & PMVD
- 2004 : Project Financing, PT. BAV
- 2006 : Sharia Capital & Venture Capital Training, PT BAV & Fatiha
- 2010 : Leadership, PT. BPUI & FranklinCovey
- 2014 : Combine Assurance (GRC), OJK & DKP
- 2015 : Business Valuation, PT BAV & M-Knows
- 2018 : Boosting Trust & Confidence in Fintech, VedapraXis & TICMI
- 2018 : PSAK 71(IFRS 9) : Financial Instruments, AAJ & RSM
- 2018 : Sharia Overview For Executives, IBDI & ICDIF
- 2020 : Pengenalan Regulasi Umum Fintech P2P Lending Di Indonesia, AFPI
- 2020 : Ujian Sertifikasi Komisaris, AFPI
- 2020 : Accelerating SME'S Growth & Recovery Through Collaboration in Digital Ecosystem, Investree
- 2021 : Webinar Bersama Membangun Integritas Pegawai BUMN Industri Jasa Keuangan dan Asuransi, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK
- 2021 : Pelatihan Anti Korupsi : Memahami dan Memahami serta Pencegahannya untuk Direksi dan Jajaran Manajemen BUMN Sektor Jasa Keuangan, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK
- 2021 : Webinar Pencegahan Korupsi : Implementasi Good Governance dan Panduan Pencegahan Korupsi untuk BUMN Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK

Riwayat Kerja :

- 1998-2000 : Admin. Investasi PT Bahana Artha Ventura
- 2000-2017 : Venture Capital Officer Divisi Investasi & Pembiayaan PT Bahana Artha Ventura
- 2017-2021 : Kadiv Investasi & Pembiayaan PT Bahana Artha Ventura
- 2020-saat ini: Komisaris PT Kreasi Anak Indonesia (P2P Lending "GandengTangan")
- 2021-saat ini: Kadiv Pembinaan Usaha PT Bahana Artha Ventura
- 2022-saat ini: Komisaris Utama PT. Sarana Jatim Ventura

KOMISARIS**Drs. Supomo, Ak. MM**

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun. Berdomisili di Surabaya. Lahir di Lumajang, 30 Maret 1963. Memperoleh Gelar Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional pada tahun 2006 dan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1986.

Beliau diangkat menjadi Komisaris di PT. Sarana Jatim Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Mei 2022.

Pelatihan dan Sertifikasi :

- 1989 : Seminar Export Import, Bank Pasific
Seminar Treasury, Bank Pasific
- 1991 : Situasi Moneter Indonesia, Problem Pembiayaan dan Investasi tahun 1991-1992
Seminar International Banking PT. Bank Pasific, PT Bank Pasific
- 1992 : Penataan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman (P4), Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta Daerah Jawa Timur
- 1993 : Service Excelent, Bank Pacific
: Lokakarya Pengembangan Ketrampilan Manajemen, Bank Pacific
: Lokakarya Upaya Bank untuk memperkuat posisi dari segi hukum pengkreditan dan penyelesaian kredit Macet, Bank Pacific
Uniform Custom & Practice for Documentary Credits, KADIN Indonesia
- 1995 : Kursus Manajemen Dana Angkatan ke-39, Institut Bankir Indonesia
- 2000 : Diskusi Panel Proyeksi Ekonomi & Otonomi Daerah 2001, Partai Golkar
- 2002 : Personal Development, LPPM "KIM" Drs.J.Tanzil & Co.
- 2003 : Diskusi Panel Upaya Menggerakkan Sektor Riil Tahun 2004, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
- 2004 : Seminar pergerakan IHSG, nilai tukar & Prospek Perekonomian Indonesia Seputar Pemilihan Presiden RI, LPMB UNAIR
: Urgensi implementasi good corporate governance di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, BAHANA-SDP
- 2005 : Asian International Executive Programme, INSEAD
: Sosialisasi Peraturan Perusahaan & Kebijakan Perusahaan Lainnya, BAHANA
- 2018 : PSAK 71 (IFRS 9) : Financial Instrument, RSM

Riwayat Pekerjaan:

1987-1989	:	Staff Auditor KAP Drs. Wiyoko & Co. Suwandi
1989-1990	:	Staff Audit Intern PT. Bank Dagang Nasional Indonesia
1990-1992	:	Account Officer PT. Bank Pasific Indonesia Cabang Surabaya
1992-1993	:	Marketing Group Head PT. Bank Pasific Indonesia
1993-1997	:	Area Manager PT. Bank Pasific Indonesia
1997-1999	:	Unit Branch PT. Bank Pasific Indonesia
2000-2004	:	Direktur Utama PT. Sarana Jatim Ventura
2004-2005	:	Komisaris di PT. Sarana Jabar Ventura, PT. Sarana Jatim Ventura, PT. Sarana Kalbar Ventura, PT. Sarana Maluku Ventura, PT. Sarana Sumut Ventura
		Direktur Supervisi Wilayah I PT. Bahana Artha Ventura
2005-2006	:	Direktur Utama Mitra Ventura Indonesia
2006-2014	:	Direktur Utama PT. Mitratani Dua Tujuh
2006-2012	:	Komisaris Utama PT. Sarana Kalsel Ventura Komisaris PT. Sarana NTB Ventura
2012-2019	:	Komisaris PT. Sarana Jabar Ventura Komisaris Utama PT. Sarana Kalbar Ventura Komisaris Utama PT. Sarana Riau Ventura
2014-2017	:	Direktur PT. Bahana Artha Ventura
2016-2019	:	Komisaris Utama PT. Kalbar Ventura
2017-2018	:	Plt Direktur PT. Bahana Artha Ventura
2018-2019	:	Komisaris Utama PT. Sarana Bali Ventura Komisaris PT. Sarana Jakarta Ventura
2018-2020	:	Asisten Direktur PT. Medco Intidynamika
2019-Saat ini	:	Komisaris PT. Sarana Jatim Ventura
2020- saat ini	:	Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

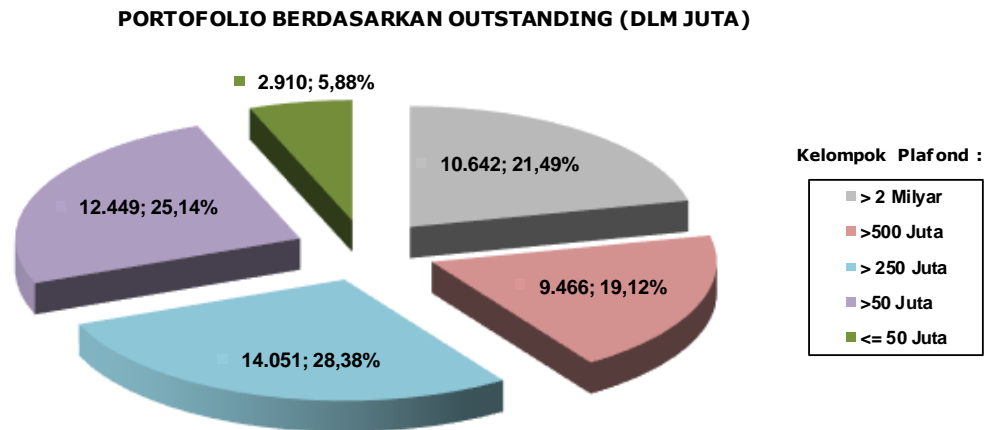
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Selama tahun 2023, perseroan telah merealisasikan pencairan pembiayaan sebesar Rp 34 milyar kepada debitur, dengan komposisi debitur baru sebesar Rp 10 milyar dan debitur lama (menambah outstanding yang ada) sebesar Rp 24 milyar.

2. Dana yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2023 terdiri dari Dana Sendiri (Ekuitas) sebesar Rp 58,3 milyar dan Kredit Program sebesar 5,8 milyar. Sehingga jumlah dana yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp 64 milyar. Jumlah dana tersebut menurun signifikan dibandingkan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 83,6 milyar. Selama tahun 2023 tidak ada tambahan pendanaan, selain dari Pinjaman Rekening Koran, di mana pinjaman tersebut juga telah lunas pada akhir tahun 2023.
3. Non Performing Financing pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 14,8 milyar atau 24,07% dari outstanding investasi sebesar Rp 61,5 milyar. Dibandingkan dengan NPF tahun 2022 sebesar Rp 23,4 milyar dari outstanding investasi sebesar Rp 83,7 milyar atau 27,97%. NPF sedikit berkurang sebesar 3,9% dibandingkan tahun 2022, meskipun secara nominal atau angka absolut mengalami penurunan sebesar Rp 8,6 milyar. Faktor penyelesaian beberapa debitur NPF, *write-off* atas outstanding tersisa PT Sentra Sinergi Surabaya sebesar Rp 2 Milyar pada akhir tahun 2023 berkontribusi terhadap penurunan NPF. Perseroan berupaya keras menurunkan NPF, antara lain dengan melakukan restrukturisasi dan berbagai tindakan litigasi. Namun upaya tersebut, terutama tindakan litigasi belum memberikan hasil yang berarti. Perbaikan terus menerus di internal perusahaan terutama pada Proses Bisnis yang dilakukan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan, seperti :
 - Keikutsertaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di OJK yang sudah terrealisasi sejak tahun 2018, yang banyak membantu proses awal due dilligence ke calon debitur;
 - Melakukan revisi atas Pedoman Pembiayaan Modal Ventura, membuat Pedoman Pembiayaan Program Kemitraan dan Key Performance Indicator (KPI) Karyawan dan Direksi di tahun 2020, dengan tujuan mengupdate dengan perkembangan terbaru peraturan yang ada khususnya peraturan di bidang pembiayaan agar tercipta Good Corporate Governance (GCG);
 - Mendayagunakan fungsi Risk Management dan SPI agar bisa mengelola resiko yang ada dalam perusahaan;
 - Melakukan spreading risk dengan memperbanyak Number of Account (NOA), khususnya pembiayaan pada skala kecil dan mikro dengan plafond di bawah Rp 500 Juta;
 - Trend upaya spreading risk dan penyaluran pembiayaan di bawah Rp 500 Juta sudah tampak dengan adanya penurunan rata-rata pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Kinerja keuangan tahun 2023 masih sangat terdampak belum membaiknya kualitas aset produktif dan upaya pembentukan CKPN. Perseroan memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 964 juta. Kondisi ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh laba sebesar Rp 977 juta.
5. Pada akhir tahun 2023 komposisi pembiayaan \leq Rp 500 juta dibandingkan dengan $>$ Rp 500 Juta adalah 59,39% berbanding 40,61%. Perseroan akan terus berupaya mencapai komposisi yang ideal dengan tujuan utama melakukan spreading risk tanpa mengurangi tingkat profitabilitas

Portofolio pembiayaan kepada PU per 31 Desember 2023 tersebar dalam skala pembiayaan sebagai berikut:



6. Perseroan berupaya mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia-nya untuk mendukung perwujudan tercapainya lembaga keuangan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi di bidang lembaga keuangan. Perusahaan juga melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas dan program efisiensi. Fokus optimalisasi adalah di bagian umum (general affairs). Program efisiensi yang dilakukan adalah membuat program pensiun dini untuk beberapa karyawan yang kurang produktif, dengan memberikan hak-haknya sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara rutin dan berkala untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perseroan berdasarkan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) yang disusun dan berupaya meminimalkan dampak buruk penurunan kualitas aset;
2. Secara aktif memberikan arahan dan jika dibutuhkan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai potensi dan risiko PU atau CPU ;
3. Menyetujui Rencana Bisnis Tahunan (RBT) Tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024.
4. Menyarankan untuk melakukan penyaluran dana Program Kemitraan (PK) BUMN sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan secara bertahap, selain juga tetap melakukan pembiayaan produktif reguler dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan;
5. Menunjuk dan menetapkan audit eksternal sesuai dengan yang diamanahkan oleh RUPS tanggal 8 Mei 2023 kepada Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;

6. Terkait Rencana Tindak Lanjut terkait Pembiayaan Bermasalah, AYDA dan CKPN:
 - Fokus dilakukan penagihan/*collecting* serta litigasi ke debitur yang masuk dalam kategori NPF selain dilakukan optimalisasi penyaluran dana PK agar NPF di Tahun 2023 dapat mendekati target NPF yang ditetapkan oleh OJK;
 - Komisariss juga memberikan arahan agar VCO ikut membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk perbaikan kualitas aset produktif (tingkat kualitas kesehatan) debitur;
 - Mengarahkan untuk membuat *Action Plan* selanjutnya terkait rencana PT. Sarana Jatim Ventura untuk memenuhi ketentuan NPF di tahun 2023 untuk dipaparkan kepada Pihak OJK;
 - Pelaksanaan penjualan AYDA sehingga aset non produktif dapat segera menjadi aset produktif;
 - Untuk debitur yang saat ini sedang dalam masa pailit agar dibuatkan *action plan* untuk pemberesan harta pailit sehingga dapat segera menjadi aset produktif.
 - Fokus melakukan restrukturisasi dan penyelesaian atas pembiayaan bermasalah. Memaksimalkan melakukan perbaikan kualitas aset produktif (tingkat kualitas kesehatan) debitur dengan menitikberatkan 2 (dua) hal terkait kemampuan dan kemauan bayar dari debitur tiap bulannya
7. Tetap melaksanakan kegiatan penghematan dan efisiensi biaya di segala bidang termasuk dalam hal penghematan energi dalam penggunaan fasilitas kantor;
8. Memaksimalkan sumber dana baru dari Program PUMK dari BUMN yang dikoordinir PT. BAV dengan mempersiapkan dan menyusun *pipeline* calon debitur oleh seluruh VCO ;
9. Mengevaluasi kesepakatan bagi VCO untuk menambah minimal 1 (satu) debitur baru setiap bulannya;
10. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pengendalian risiko (*risk management*) sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh OJK. Kami bersama-sama dengan Direksi telah dan akan terus melakukan langkah koordinasi dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi, baik dinamika internal dan/atau eksternal yang dialami debitur, pengaruh perekonomian nasional dan global khususnya dampak pandemi covid-19, maupun dinamika peraturan yang harus dilaksanakan.

3. Rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di PMV atau PMVS	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1	Noor Alim Fardianto	Direktur Operasional	Komisaris	PT. Karya Usaha Andalan Terpadu	Perdagangan dan Jasa

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di PMV atau PMVS	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1	Drajat Hendarsan	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris PT Kreasi Anak Indonesia (P2P Lending "GandengTangan"	Lembaga Pembiayaan
2	Supomo	Komisaris	Direktur Utama	LPD Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	Lembaga Pembiayaan

Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi dan misi PT. Sarana Jatim Ventura.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Tempat Penyelenggara
1.	Tri Agus Darmawan	OJK Webinar: "Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023"	10 Januari 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute

		BRI Microfinance Outlook 2023: “Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity”	26 Januari 2023	Jakarta, BRI Research Institute
		OJK Webinar: “Memperkuat Pertahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan”	22 Mei 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
		OJK Webinar: “Leadership in Changing Atmosphere”	24 Agustus 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
2.	Noor Alim Fardianto	OJK Webinar : Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
		OJK Webinar : “Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan “ OJK Institute	2 Februari 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
		OJK Webinar : “The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance“ OJK Institute	23 Februari 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
		OJK Webinar : “Prospek Insurtech di Indonesia “ OJK Institute	2 Maret 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
		OJK Webinar : “Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja IJK “ OJK Institute	30 Maret 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute

OJK Webinar : “Anti Money Laundering in Digital Era : Lesson Learned from Selected Countries “ OJK Institute	6 April 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
“Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan “ OJK Institute	13 April 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
OJK Webinar : “Peluang Metaverse di Industri Jasa Keuangan “ OJK Institute	11 Mei 2023.	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute)
OJK Webinar : “Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Sektor Pasar Modal “ OJK Institute	20 Juli 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
Pencegahan Korupsi dengan Menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan “	28 Juli 2023	Online Via Zoom, mitraberdaya.id
Seminar Khusus Akuntan Berpraktik / Regulasi - Implementasi PMPJ bagi KJA	4 Agustus 2023	Online Via Zoom Webinar, IAI
Waspada Penipuan Gaya Baru	3 Agustus 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
Enhancing Financial Performance Through Data Analytical	31 Agustus 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute
Mastering Yourself : Optimalkan Potensi dan Tingkatkan Kinerja di Era Digital	14 Desember 2023	Online Via Zoom Webinar, OJK Institute

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/Training / Seminar	Tanggal	Tempat Penyelenggara
1.	Drajat Hendarsan	Undang-Undang P2SK Sektor Modal Ventura	15 Maret 2023	Jakarta, AMVESINDO
2	Supomo	-	-	-

3. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Berikut dapat kami sampaikan kegiatan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan usaha di tahun 2023:

1. Direksi harus terus menjaga kinerja perusahaan untuk di tahun depan tidak semakin menurun kondisinya sesuai dengan target RBT 2023, akan lebih baik jika target tidak sekedar dicapai, namun harus dilampaui;
2. Perseroan dalam menyalurkan pembiayaan tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Perseroan diharapkan tetap melakukan penyaluran dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dari BUMN sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan secara bertahap dengan tetap menjaga performa pembiayaan agar tetap lancar dengan NPF atas Pembiayaan Program Kemitraan tidak boleh lebih dari 5% dari total outstanding PUMK dari BUMN yang disalurkan;
3. Pemenuhan Data Pemegang Saham untuk Pelaporan ke OJK, dengan mengirimkan surat permohonan pemenuhan kelengkapan data kepada seluruh para pemegang saham;
4. Rencana Tindak Lanjut terkait debitur Pembiayaan Bermasalah, AYDA dan CKPN: Fokus dilakukan penagihan/ *collecting* serta litigasi ke debitur NPL selain dilakukan optimalisasi penyaluran dana PK agar NPF di Tahun 2023 dapat mendekati target NPF yang ditetapkan oleh OJK;
 - Komisaris juga memberikan arahan agar VCO ikut membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk perbaikan kualitas aset produktif (tingkat kualitas kesehatan) debitur;
 - Mengarahkan untuk membuat *action plan* selanjutnya terkait rencana PT. Sarana Jatim Ventura dalam hal Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK)
 - Pelaksanaan penjualan AYDA sehingga aset non produktif dapat segera menjadi aset produktif;
 - Untuk debitur yang saat ini sedang dalam masa pailit agar dibuatkan *action plan* untuk pemberesan harta pailit sehingga dapat segera menjadi aset produktif;
 - Membentuk CKPN sesuai perhitungan dan kebutuhan pembentukan yang dipersyaratkan;

5. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perseroan sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Pengendalian Risiko (*Risk Management*) sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh OJK. Kami bersama-sama dengan Direksi telah dan akan terus melakukan langkah koordinasi dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi, baik dinamika internal dan/atau eksternal yang dialami debitur, pengaruh perekonomian nasional dan global khususnya dampak Pandemi Covid-19, maupun dinamika peraturan yang harus dilaksanakan.
6. Menunjuk dan menetapkan audit eksternal sesuai dengan yang diamanahkan oleh RUPS tanggal 8 Mei 2023 kepada Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

4. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS (jika ada) yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

- a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan, Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala bagian dan senior staf. Rapat yang dilaksanakan Direksi untuk membahas dan mendiskusikan kinerja serta perkembangan perusahaan, terutama untuk di Tahun 2023 ini lebih banyak membahas mengenai strategi peningkatan asset produktif, penanganan debitur bermasalah dan penjualan asset AYDA dan pemenuhan pelaporan dan penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK selama tahun 2023.

Selama tahun 2023 ini telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan keseluruhannya dilaksanakan di Surabaya. Pelaksanaan rapat Direksi ini telah memenuhi Peraturan OJK yang berlaku. Rapat Direksi dan Rapat-rapat komite di tingkat Direksi dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan di rapat dituangkan dalam risalah rapat yang di dokumentasikan dengan baik.

Rapat Direksi telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Fisik	Sarana Media Elektronik*)		
1	Tri Agus Darmawan	12	v		100%	
2	Noor Alim Fardianto	12	v		100%	

b. Rapat Dewan Komisaris

Pada Tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selama tahun 2023 rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk membahas kinerja dan perkembangan PT. Sarana Jatim Ventura secara Umum. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri secara fisik dan online sebanyak 1 (satu) kali dan online via zoom sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri bersama dengan Direksi. Pelaksanaan jumlah minimum rapat untuk Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dari OJK mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan Modal ventura.

Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Fisik	Sarana Media Elektronik*)		
1	Drajat Hendarsan	4	1	3	100%	
2	Supomo	4		4	100%	
3	Tri Agus Darmawan	4	1	3	100%	
4	Noor Alim Fardianto	4	1	3	100%	

B. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, terdiri atas:

1. Struktur tugas komite dan satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern:

Dalam membantu kinerja Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan, Perusahaan memiliki komite investasi. Dalam komite investasi ini fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai penasihat dan memberikan masukan pada berjalannya pelaksanaan kegiatan investasi. Komite Investasi beranggotakan Direksi dan kepala bagian terkait yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk memutuskan Jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dalam bentuk Aktiva produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan. Untuk kewenangan Komite Investasi sebagai berikut:

1. Kewenangan pemutusan pemberian Persetujuan Investasi dibawah atau sama dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah kewenangannya berada di Direksi.
2. Kewenangan pemutusan pemberian Persetujuan Investasi diatas Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berada di Direksi dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari 1 (satu) orang komisaris
3. Kewenangan pemutusan pemberian Persetujuan Investasi diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah kewenangannya berada di Direksi dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari seluruh dewan komisaris

Struktur Komite Investasi:

Ketua: -Direktur Utama : Tri Agus Darmawan
 - Direktur : Noor Alim Fardianto

Anggota Komite Investasi:

Kabag Investasi :1. Heru Kurniawan 2. Henda Hanggara
 Bagian Legal : Martina K.
 Kabag Admin Keuangan : Indira K.
 Risk Manajemen : Dewa Ayu Putu Eka A.

2. Tugas dan tanggung jawab tugas komite dan satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern

Tugas Komite Investasi:

1. Menyelenggarakan rapat/pertemuan investasi untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan meminta data/informasi apabila diperlukan.
2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan , baik pembiayaan produktif , obligasi konversi, penyertaan saham dan pembiayaan melalui pembelian surat hutang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap awal (start up) dan/atau pengembangan usaha.

Tanggung Jawab Komite Investasi:

1. Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Memastikan bahwa proses pembiayaan telah sesuai dengan penerapan manajemen resiko

3. Program kerja tugas komite dan satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan realisasinya

Berikut adalah program kerja yang sudah dicapai oleh komite Investasi di Tahun 2023:

1. Selama tahun 2023, perseroan telah merealisasikan pencairan pembiayaan sebesar Rp 34 milyar kepada Pasangan Usaha (PU), dengan komposisi PU baru sebesar Rp 10 milyar dan PU lama (menambah outstanding yang ada) sebesar Rp 24 milyar.
2. Dana yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2023 terdiri dari Dana Sendiri (Ekuitas) sebesar Rp 58,3 milyar dan Kredit Program sebesar 5,8 milyar. Sehingga jumlah dana yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp 64 milyar.

No.	Komite	Struktur
1.	-	Ketua:- Anggota:-
2.	-	Ketua:- Anggota:-

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya (jika ada)

No.	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	-	-
2.	-	-

*** Untuk saat ini masih belum ada komite lainnya selain komite Investasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pengendalian Internal**

C. Penerapan audit intern dan audit ekstern

1. Fungsi audit intern

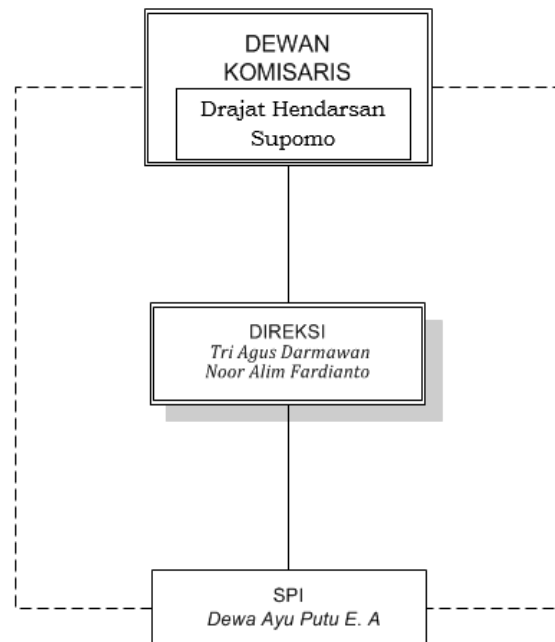
Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Ruang lingkup pekerjaan internal audit yaitu melakukan pemeriksaan, investigasi, konsultasi dan pembinaan mencakup seluruh area operasional perusahaan PT. Sarana Jatim Ventura yaitu meliputi kegiatan pembiayaan, operasional perusahaan, SDM dan kegiatan lainnya diseluruh unit usaha termasuk anak perusahaan dan afiliasinya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku untuk menentukan kecukupan pelaksanaan internal kontrol, penerapan manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan perusahaan.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit intern

Satuan kerja audit intern merupakan organisasi independen, yang berada di bawah langsung Direksi dan dalam kegiatannya juga dapat bertanggung jawab secara tidak langsung pada Dewan Komisaris.



c. Independensi audit intern

PT. Sarana Jatim Ventura memiliki Internal audit yang independen dalam melakukan aktivitas internal audit, investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam menjalankan independensinya maka:

1. Internal audit mampu untuk mengemukakan pandangannya dan pemikirannya tanpa dipengaruhi dan/atau mendapatkan tekanan dari orang lain.
2. Internal audit memiliki kebebasan untuk menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan sesuai dengan keahlian yang memadai dan professional.
3. Internal audit tidak terlibat dalam aktivitas kegiatan operasional perusahaan, namun jika kondisi perusahaan menghendaki adanya perangkapan tugas, hanya diperbolehkan terlibat bukan dalam hal yang strategis.

d. Uraian tugas satuan kerja audit intern

1. Audit Internal melakukan assurance

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana program Audit internal Tahunan yang sudah disetujui oleh Direksi;
- b. Melakukan supervisi penugasan audit;
- c. Mengevaluasi dan menguji kecukupan dan efektivitas pelaksanaan Tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan Internal kontrol;
- d. Melaporkan hasil audit dan menyampaikan Laporan tersebut pada Direksi;
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi.

2. Audit Internal melakukan konsultasi

- a. Menyusun rencana konsultasi tahunan dan penugasannya;
- b. Melaksanakan penugasan konsultasi ;
- c. Memantau dan melakukan supervisi penugasan konsultasi ;
- d. Melaporkan hasil konsultasi .

3. Audit Internal melakukan program peningkatan kualitas

- a. Merencanakan program peningkatan kualitas hasil audit
- b. Melaksanakan program peningkatan kualitas hasil audit
- c. Melakukan tindak lanjut hasil atas hasil program peningkatan kualitas hasil

e. Profil kepala satuan kerja audit intern

Sejak tahun 2017 Audit internal perusahaan dijabat oleh Dewa Ayu Putu Eka Arianti, melalui surat keputusan Direksi No 01/DIR/I/2017 tanggal 12/01/2017 . Seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di PT. Sarana Jatim Ventura sebagai staf bagian Legal pada tahun 2012 dan pernah bertugas dibagian Investasi sebagai Venture Capital Officer sampai dengan tahun 2016. Saat ini Karyawan tersebut juga menjabat sebagai staf di Manajemen Risiko perusahaan. Meraih Gelar Sarjana Hukum tahun 2009 dari Universitas Brawijaya Malang. Dalam mengembangkan kemampuannya dibidang audit, karyawan tersebut juga sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan Internal Audit dan Fraud Detection yang diselenggarakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2019.

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit intern

Saat ini untuk pekerjaan audit intern masih dijabat oleh satu orang karyawan. Pemenuhan SDM ini disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan perusahaan yang ada. Akan tetapi untuk menjalankan fungsi auditor intern yang lebih baik maka dilakukan program pengembangan SDM secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Intern perusahaan.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit intern

Evaluasi Internal kontrol di Tahun 2023 fokus pada pelaksanaan internal kontrol dalam pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada pasangan usaha selama tahun 2023, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan internal kontrol yang ada di PT. Sarana Jatim Ventura termasuk dalam kategori CUKUP, dengan adanya temuan yaitu:

1. Tingkat kolektibilitas dibawah 80%, dengan Non Performing Financing pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 14,8 milyar atau 24,07% dari outstanding investasi sebesar Rp 61,5 milyar.
2. Pelaksanaan monitoring pada debitur yang tidak dilakukan secara rutin, sesuai dengan ketentuan pembiayaan salah satu penyebabnya dikarenakan lokasi yang menyebar serta masih adanya pelaksanaan kunjungan/monitoring usaha ke debitur yang tidak ada dokumentasi tertulisnya.
3. Kendala pelaksanaan lelang dikarenakan masih adanya kasus pengikatan jaminan di Notaris yang belum selesai melebihi batas wajar.

Setiap laporan hasil audit disampaikan kepada manajemen perusahaan dan pihak yang diaudit dilengkapi dengan rencana tindakan perbaikan.

Berikut saran untuk tindakan perbaikan :

1. Dengan tingkat NPF yang cukup tinggi diatas 24,07% maka pihak manajemen perlu untuk membuat kebijakan dan tindakan yang dapat dilaksanakan untuk menurunkan tingkat NPF ini dengan pertimbangan bahwa di bulan Desember ini besarnya NPF akan menjadi potret perusahaan selama satu tahun kedepan.
2. Peranan kepala bagian masing-masing sangat penting untuk memonitoring kinerja petugas VCO dan staf remedial setiap kali dilaksanakan kunjungan.
3. Melakukan pengelompokan debitur yang masih ada kendala di proses legalnya dan membuat langkah penyelesaiannya sehingga dapat dibuat prioritas penyelesaian.
4. Perlu adanya administrasi data yang akurat pada bagian Legal terkait dokumen jaminan yang masih dalam pengurusan di Notaris dan agingnya (jangka waktu) penyelesaian dokumen di Notaris. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian Notaris rekanan di SJV.

2. Fungsi audit ekstern

PT. Sarana Jatim Ventura melalui Dewan Komissaris telah menunjuk auditor Eksternal sesuai dengan mandat dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Mei 2023 dengan menetapkan Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan untuk melakukan review atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas anak di Tahun 2023. KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai dengan standar professional akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas anak PT. Sarana Jatim Ventura telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Berikut Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan PT. Sarana Jatim Ventura selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Audit Ekstern
2019	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	Drs. Agus Subyantara, Ak.,MM., CPA..	Rp. 45.000.000
		Nomor STTD AP-223/NB.122/2018	
2020	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	Drs. Agus Subyantara, Ak., MM., CPA.	Rp. 45.000.000
		Nomor STTD AP-223/NB.122/2018	
2021	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	Drs. Friyanto, MSA.,Ak.,CA.,CPA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,ACPA.,CTA	Rp. 43.000.000
		Nomor STTD AP-213/NB.122/2018	
2022	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	M. Yoga Dharma Putra	Rp. 42.000.000
		Nomor STTD AP-33/NB.122/2021	
2023	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	M. Yoga Dharma Putra	Rp. 42.000.000
		Nomor STTD AP-33/NB.122/2021	

D. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris:

1. Memantau dan mengevaluasi kebijakan operasional PT. Sarana Jatim Ventura yang dilakukan Direksi;
2. Konsisten untuk menyelenggarakan rapat berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja yang telah dibuat;
3. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan efektif sesuai dengan jenjang organisasi;
4. Melakukan optimalisasi fungsi komite investasi dengan memberikan masukan dan saran pada pembiayaan melalui proses penelaahan sesuai rencana kerja;
5. Memastikan saran dan rekomendasi setiap laporan hasil pemeriksaan dari Auditor telah ditindaklanjuti.

Pengawasan Aktif Direksi:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang diambil oleh perusahaan.
2. Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis Perusahaan, strategi dan action plans telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala dengan tim manajemen perusahaan.
3. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan perusahaan.
4. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan akan kesadaran risiko di setiap lini perusahaan.
5. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan efektif sesuai jenjang organisasi.
6. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Auditor dengan efektif.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Industri Modal Ventura ini merupakan salah satu industri yang sarat dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan dana yang disalurkan khusus untuk pembiayaan usaha bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu perlu adanya penetapan mengenai kebijakan, prosedur serta limit risiko yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis PT. Sarana Jatim Ventura. Penyusunan kebijakan dan prosedur ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain jenis pembiayaan, kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko yang diambil sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Sarana Jatim Ventura dalam pemenuhan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan bagian manajemen risiko yang bertugas untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko-risiko yang ada di perusahaan;
2. Penyesuaian, pengembangan, serta mengupdate seluruh kebijakan dan prosedur terkait aspek operasional dan investasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
3. Mensosialisasikan SOP melalui internal training;
4. Memastikan bahwa otorisasi atas limit-limit telah dilaksanakan sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.

PT. Sarana Jatim Ventura telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Penetapan prosedur berbasis risiko ini dilaksanakan pada semua produk dan/atau aktivitas perusahaan yang mengandung risiko. Pelaksanaan evaluasi atas penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Perusahaan dalam melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko terhadap aktivitas dan produk perusahaan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa setiap aktivitas dan produk baru yang telah dilakukan pengujian kepatutan dan manajemen risiko;
2. Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan akurat dan tepat.
3. Memberikan perhatian lebih pada bagian/kegiatan perusahaan yang dinilai memiliki potensi risiko yang tinggi seperti pada divisi investasi dan operasional perusahaan.

4. Sistem informasi manajemen risiko

PT. Sarana Jatim Ventura memiliki Sistem Informasi Manajemen yang bernama FLMS yang terintegrasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Sistem ini memberikan informasi kinerja dari portofolio pembiayaan dalam berbagai tingkatan dan segmen yang dapat digunakan untuk pengelolaan risiko pembiayaan. Untuk saat ini FLMS dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesehatan dari Pembiayaan dan tingkat konsentrasi portofolio pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendeteksi risiko pembiayaan pada tahap awal sehingga dapat dilakukan antisipasi perbaikan tepat waktu. Berikut kami sampaikan hasil penilaian sendiri atas penerapan sistem manajemen risiko per 31 Desember 2023:

No	Keterangan	Bobot	Nilai akhir	Kualitas	Nilai Akhir Risiko komposit
1	Pembiayaan	40,00%	30,00	Low to Moderate	12,00
2	Likuiditas	30,00%	20,00	Low	6,00
3	Operasional	5,00%	24,00	Low to Moderate	1,20
4	Stratejik	10,00%	84,00	High	8,40
5	Hukum	5,00%	20,00	Low	1,00
6	Pasar	5,00%	20,00	Low	1,00
7	Reputasi	3,00%	20,00	Low	0,60
8	Kepatuhan	2,00%	20,00	Low	0,40
		100,00%			30,60
					Low to Moderate

Risk Control Assesment Des 2023					
No	Keterangan	Bobot	Nilai Akhir	Kualitas	Nilai Akhir Risiko komposit
1	Pembiayaan	25,0%	26,67	Satisfactory	6,67
2	Likuiditas	25,0%	30,42	Satisfactory	7,60
3	Operasional	5,0%	25,12	Satisfactory	1,26
4	Stratejik	15,0%	36,46	Satisfactory	5,47
5	Hukum	5,0%	12,50	Strong	0,63
6	Pasar	10,0%	39,06	Satisfactory	3,91
7	Reputasi	5,0%	25,00	Satisfactory	1,25
8	Kepatuhan	10,0%	25,00	Satisfactory	2,50
		100,0%			29,28
					Satisfactory

COMPOSITE RISK MATRIKS						
		RISK CONTROL SYSTEM				
		Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
INHEREN RISK	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate
	Low to Moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
	Moderate to High	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	High	High

Berdasarkan hasil pengukuran pelaksanaan Risk Control system posisi Desember 2023 termasuk dalam “Low to moderate”, dari hasil ini maka perusahaan akan melakukan perbaikan pada pengelolaan risiko pembiayaan , operasional, stratejik dan pasar di tahun 2024.

5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

PT. Sarana Jatim Ventura telah memiliki bagian Sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, divisi operasional dan investasi dimana masing-masing memiliki fungsi kontrol utamanya yang melekat pada masing-masing pejabat secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal yang dilakukan disetiap bagian perusahaan yang dilaksanakan sebagai salah satu mitigasi risiko.
2. Melakukan evaluasi struktur organisasi dan kecukupan sumber daya manusia (karyawan) dan melengkapi kewenangan, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan dan pembatasan kewenangan berdasarkan jenjang organisasi.

Internal kontrol dengan melakukan pemantauan secara harian terhadap transaksi harian yang dilaksanakan perusahaan.

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya

Penerapan Remunerasi ini sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam kebijakan Surat Keputusan Komisaris Nomor 01/SK.KOM/IV/2016 dan sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan . Remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah dalam bentuk Honorium Pengurus dan Tunjangan Telepon/Komunikasi.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor 01/SK.KOM/IV/2016 dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan , untuk penghasilan tidak tetap lainnya (Natura/Non Natura) terdiri dari:

1. Dewan Komisaris:
 - Uang Pergantian transportasi Rapat
2. Direksi :
 - Tunjangan Lainnya(Tunjangan Hari Raya), Tunjangan Cuti, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Transportasi dan bonus;
 - Uang Perjalanan dinas;
 - Asuransi Kesehatan;
 - Tunjangan Pajak;
 - Fasilitas kendaraan operasional;
 - Pinjaman.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah mengenai penetapan prosentase pemberian honorium untuk Dewan Komisaris dengan kebijakan besaran pemberian honorium Komisaris Utama adalah 30% dari Direktur Utama dan honorium untuk Komisaris adalah 80% dari Komisaris Utama. Sedangkan honorarium Direktur Utama adalah 90% dari Direktur Utama.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Pemberian Remunerasi kepada pengurus perusahaan dalam satu tahun telah sesuai dengan kebijakan remunerasi perusahaan dan Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan agar sesuai dengan penerapan Tata kelola yang baik, dengan besaran nilai remunerasi di tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura**)
Direksi	Jumlah Direksi	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	936 Juta	Kendaraan, Asuransi Kesehatan (RI), Pinjaman, Tunjangan Perjalanan Dinas,
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	210 Juta	Akomodasi Rapat

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS (jika ada)
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-	-
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	2	-

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa 2 (Dua) orang Direksi dan untuk 2 (Dua) orang pengurus lainnya memperoleh jumlah remunerasi sebesar Rp.500.000.000,- kebawah dalam satu tahun. Pemberian remunerasi ini sudah sesuai dengan peraturan remunerasi yang diatur oleh perusahaan.

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah atas imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,4:1
- b. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,1:1
- c. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,4 :1
- d. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,5:1

Yang dimaksud dengan gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan kepada karyawan PT. Sarana Jatim Ventura atas hasil kerjanya yang diberikan secara teratur dan ditetapkan serta dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Penerapan skala gaji bagi Karyawan PT. Sarana Jatim Ventura telah dituangkan dalam Susunan Skala Upah Perusahaan sebagai implementasi dari Penerapan tata kelola yang baik.

F. Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV atau PMVS

Perusahaan PT. Sarana Jatim Ventura selalu berusaha membangun komunikasi dengan para *stakeholders* melalui berbagai media termasuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Publikasi Laporan Keuangan kepada para *stakeholders*. Perusahaan juga melakukan publikasi umum kepada masyarakat, baik atas informasi keuangan terkait produk perusahaan maupun non keuangan. Selain itu Perusahaan juga memiliki situs www.jatimventura.com yang dapat diakses secara umum untuk mendapatkan informasi mengenai PT. Sarana Jatim Ventura.

G. Pengungkapan hal penting lainnya

1. Pengunduran diri atau pemberhentian komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS (jika ada)

Selama Tahun 2023 di PT. Sarana Jatim Ventura tidak ada pengunduran diri dan pemberhentian Auditor Eksternal.

2. Sertifikasi:

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Sertifikat Keanggotaan AMVESINDO (Asosiasi Modal Ventura untuk Start Up Indonesia)	Jakarta, 2023	AMVESINDO (Asosiasi Modal Ventura Untuk Start Up Indonesia)
2.	Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	Jakarta, 2023	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

3. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.							

*** Di tahun 2022 PT. Sarana Jatim Ventura belum memiliki tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan.**

4. Transaksi material dengan pihak terkait

Di tahun 2023 PT. Sarana Jatim Ventura belum memiliki transaksi yang sifatnya material dengan pihak terkait

5. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset PMV atau PMVS oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS (jika ada), dan pegawai PMV atau PMVS.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan*)
1.					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Di Tahun 2023, belum ada benturan kepentingan antara pemangku jabatan di PT. Sarana Jatim Ventura dengan prosedur yang berlaku

6. Laporan pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud*

a. Inventarisasi kejadian *fraud* dan tindak lanjut:

Jenis Fraud	Tanggal terjadinya Fraud	Divisi/Bagian	Pihak yang terlibat	Jabatan	Kerugian (Rp)	Tindakan Perusahaan	Kelemahan/ Penyebab terjadinya Fraud	Tindak Lanjut / Perbaikan	Kronologis kejadian Fraud
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Perkembangan pelaksanaan penerapan strategi anti *fraud*⁷⁾

1) Pencegahan:

Untuk mengurangi risiko kerugian akibat dari adanya Fraud, perusahaan telah melakukan berbagai langkah pencegahan antara lain memperkuat budaya perusahaan dan memperkecil peluang untuk terjadinya fraud dengan memperbaiki sistem dan prosedur kerja. Selain itu Manajemen perusahaan telah membuat ketentuan tertulis mengenai penanganan pelanggaran yang tertuang dalam peraturan perusahaan. Ketentuan ini saat ini telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.

2) Deteksi:

Untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan atas kode etik dan peraturan perusahaan serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik, maka perusahaan siap menerima pengaduan dari pelapor yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Setiap tindakan pelaporan akan ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi oleh Audit Internal dan petugas yang ditunjuk perusahaan.

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

Pelaporan yang diterima akan dilakukan analisa dan Investigasi dari audit internal dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan, surat maupun email ke perusahaan dan data pelapor akan dijaga kerahasiannya. Apabila

dalam investigasi ditemukan bahwa telah ada fraud maka akan dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat, bahkan memprosesnya melalui prosedur hukum.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil laporan tindakan fraud yang telah dilakukan. Hasil laporan ini akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kelemahan di sistem dan prosedur yang ada. Untuk kemudian akan dilakukan perbaikan.

Penjelasan:

- 1) Jenis *fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, dan lainnya.
- 2) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- 3) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- 4) Tindakan PMV atau PMVS merupakan respon PMV atau PMVS atas kejadian *fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan, antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- 5) Kelemahan/penyebab terjadinya *fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada PMV atau PMVS yang menimbulkan *fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari PMV atau PMVS.
- 6) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan PMV atau PMVS terkait kelemahan yang menimbulkan *fraud*.

- 7) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi, dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *fraud* pada periode laporan.

Penyimpangan intern dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS (jika ada)	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Intern	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	0	0	0

7. Permasalahan hukum

Berkaitan dengan karakter dari industri keuangan, PT. Sarana Jatim Ventura harus menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Selama tahun 2023, PT. Sarana Jatim Ventura dengan debitur dan pihak ketiga.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap		
Putusan Pailit PU PT. Lagawico Pratama dan PT. Gema Nawa Bintang Surabaya	2	-

Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata		
a.-	-	-
Total	2	-

Di tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus kepailitan, untuk kasus kepailitan Lagawico Pratama sudah selesai dan dilakukan pembagian harta pailit di bulan Agustus tahun 2023, sedangkan untuk kasus kepailitan PT. Gema Nawa Bintang Surabaya sampai dengan saat ini masih berjalan dan menunggu pemberesan harta pailit.

8. Etika Bisnis

PT. Sarana Jatim Ventura memiliki standar Etika Bisnis yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Bab II mengenai Etika Profesional . Pengaturan mengenai Standar Etika Profesional ini merupakan salah satu komitmen PT. Sarana Jatim Ventura atas implementasi Tata Kelola yang baik. Standar Etika ini disusun untuk seluruh staf dalam bertingkah laku untuk menjaga Integritas, kredibilitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pada PT. Sarana Jatim Ventura sebagai Lembaga Keuangan.

Sikap dan Perilaku Karyawan :

Citra yang baik di masyarakat sangat penting bagi setiap lembaga keuangan. Citra yang baik dapat terbentuk dari perilaku atau tindakan kita dalam sikap dan perilaku karyawan dari PT. Sarana Jatim Ventura dalam memberikan pelayanan ke pihak luar baik kepada debitur, calon debitur, relasi, rekanan dan, sama pentingnya adalah cara pelayanan kita ke dalam diantara sesama karyawan sendiri. Untuk itu semua karyawan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari adanya kemungkinan dan terlihat adanya benturan kepentingan pribadi. Yang dimaksud menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi adalah menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan atau mempengaruhi penilaian perusahaan, atau

hilangnya prinsip *'independency'*. Sebagai contoh adanya benturan kepentingan pribadi adalah pembiayaan dilakukan karena adanya karyawan/karyawati PT Sarana Jatim Ventura:

- Pembiayaan dilakukan karena adanya karyawan/karyawati PT Sarana Jatim Ventura,
 - Mempunyai kepentingan financial sebagai pemilik.
 - Sebagai pemegang saham/mitra usaha.
 - Sebagai debitur/kreditur secara pribadi dalam usaha debitur/calon debitur.
 - Saudara dekat debitur/calon debitur dan lain-lain.
 - Tidak melakukan insider trading.
 - Memiliki pekerjaan lain yang dilakukan sehari-hari pada waktu jam kerja resmi sebagai karyawan PT Sarana Jatim Ventura.
2. Menerima atau meminta pemberian dari calon debitur/debitur atau pribadi yang terkait atau mitra lainnya.
 3. Menerima atau meminta menjadi pengurus atau anggota manajemen perusahaan lain kecuali atas ijin Direksi PT Sarana Jatim Ventura untuk menjalankan tugas sebagai karyawan PT Sarana Jatim Ventura.
 4. Tidak menyalahgunakan kedudukan profesional untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini karyawan PT Sarana Jatim Ventura menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi.
 5. Menggunakan nama PT Sarana Jatim Ventura untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan pribadi dari pihak lain.
 6. Berhutang secara pribadi ataupun atas nama PT Sarana Jatim Ventura kepada calon debitur/debitur atau pribadi-pribadi yang ada di dalamnya.
 7. Bersikap obyektif dan tidak memihak. Dalam hal ini karyawan PT Sarana Jatim Ventura dituntut dapat bersifat profesional, obyektif dan tidak memihak terhadap sesuatu dalam bentuk apapun. Sebagai contoh:

- Memberi perhatian yang sama terhadap *business plan* yang memiliki bentuk luar bagus (sesuai standar) maupun yang kurang bagus.
 - Memberi kesempatan yang sama kepada calon debitur yang datang meminta pembiayaan kepada PT Sarana Jatim Ventura dengan membawa rekomendasi pejabat ataupun tidak.
8. Menerima calon debitur dengan cara yang sama tanpa memperhatikan penampilan, jabatan, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain yang dapat membedakan.
 9. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Sebagai karyawan PT Sarana Jatim Ventura dituntut untuk dapat merahasiakan segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan kepada pihak-pihak di luar Perusahaan yang tidak berkepentingan. Sebagai contoh menjaga kerahasiaan perusahaan adalah,
 - Dengan sengaja atau tidak, dilarang membocorkan rahasia atau memberikan copy dokumen-dokumen PT Sarana Jatim Ventura tanpa seijin Perusahaan.
 - Tidak memberikan informasi dan/atau data-data calon debitur/debitur kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 10. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Setiap karyawan PT Sarana Jatim Ventura dituntut untuk memberikan dan mengerjakan secara sungguh-sungguh pada setiap tahapan pekerjaan, tanpa melihat asal dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh:
 - Venture Capital Officer (VCO) harus proaktif terhadap kebutuhan PPU, baik sebelum maupun sesudah pencairan dana dilakukan.
 - Karyawan harus bekerja dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kemajuan Perusahaan, misalnya bekerja secara efisien, efektif, disiplin, tidak boros dan tidak merugikan perusahaan.
 - a. Kesetiaan terhadap tanggung jawab professional.
 11. Setiap karyawan dituntut secara sungguh-sungguh merencanakan dan menyampaikan pemikiran yang relevan terhadap tugas dan tanggung jawabnya didalam melaksanakan pekerjaan.

9. Informasi material lain mengenai PMV atau PMVS yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern, dan permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada PMV atau PMVS.

PT. Sarana Jatim Ventura di tahun 2023 tidak ada permasalahan akibat pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Menyetujui,



Tri Agus Darmawan
Direktur Utama



Noor Alim Fardianto
Direktur